



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai Hasil Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 oleh Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, perlu mereviu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dengan menyempurnakan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016- 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019.

Pasal 1

Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Bab V halaman 152 -157 Tabel 5 Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) Tahun 2016-2021 disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 48 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JUNI 2019

PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021

.....
.....

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 - 2021

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan | OPD | Satuan | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|--|----------------------------|--------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| MISI 1 : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. | Indeks Reformasi Birokrasi | NA | 73 | Terwujudnya pelayanan prima. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Penunjang urusan pemerintahan | Setda Dukcapil Perpusip DPMPTSP Kecamatan | Indeks | 77,51 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| | | | | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. | Nilai SAKIP. | Penunjang urusan pemerintahan | Setda Bappeda Litbang Inspektorat | Nilai | CC | B | B | B | BB | A | A |
| | | | | | Nilai LPPD | Penunjang urusan pemerintahan | Setda | Nilai | T | T | T | T | ST | ST | ST |
| | | | | | Opini BPK | Penunjang urusan pemerintahan | BPKAD | Nilai | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan | Indeks profesionalitas ASN | Penunjang urusan pemerintahan | BKPPD | Index | n/a | n/a | 86 | 86,3 | 86,6 | 86,9 | 87,2 |
| MISI 2 : Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis | Pertumbuhan Ekonomi | 5,27 | 5,65 | Meningkatnya Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro | % Pertumbuhan Usaha Mikro | Koperasi dan UKM | Dinas Perdakum | Persen | 1,80 % | 1,82% | 1,83% | 1,84% | 1,85% | 1,87% | 1,90% |
| | | | | | % Koperasi sehat | Koperasi dan UKM | Dinas | Persen | 11,67 % | 13,00 % | 15,00 % | 18,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan | OPD | Satuan | Target | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | | Kondisi Awal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kondisi Akhir |
| Potensi Daerah | | | | | | | Perdakum | | | | | | | | |
| | Index GINI (Ketimpangan Wilayah) | 0,29 | 0,32 | Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan. | % Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Perindustrian | Dinas Perdakum | Persen | 0,20 % | 0,20% | 0,22% | 0,25% | 0,27% | 0,30% | 0,33% |
| | | | | | % PDRB Sektor Perdagangan | Perdagangan | Dinas Perdakum | Persen | 16,15 % | 16,40% | 16,75% | 16,85% | 16,95 % | 17,05 % | 17,15% |
| | | | | | % PDRB Sektor Industri | Perindustrian | Dinas Perdakum | Persen | 6,74% | 6,85% | 6,95% | 7,00% | 7,05% | 7,10% | 7,15% |
| | | | | Optimalisasi Sektor Pariwisata | Jumlah kunjungan wisata | Pariwisata | Dinas Pariwisata | Orang | 396.926 | 416.772 | 437.610 | 459.490 | 482.464 | 506.587 | 531.916 |
| Meningkatnya Iklim Investasi sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi Daerah | % Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN | Penanaman Modal | DPM PTSP | Persen | - | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | | | | |
| MISI 3 : Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab | Indeks Infrastruktur | 67% | 76% | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar. | % Infrastruktur publik dalam kondisi baik. | Pekerjaan Umum dan Perhubungan | Dinas PUPR Dinas Perhubungan | Persen | 71,53 % | 75,69% | 77,04% | 78,6% | 81,55 % | 83,6% | 83% |
| MISI 4 : Membangun Pertanian Sebagai Pengembangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing Tangguh | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan sektor | PDRB sektor pertanian | 4,7 | 5,4 | Meningkatnya produksi | Nilai Tukar Petani | Pertanian | Dinas Pertanian | Persen | 104,75 | 107,59 | 105,6 | 106,21 | 106,84 | 107,25 | 107,85 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan | OPD | Satuan | Target | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------|---|--|-------------------------|--|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | | Kondisi Awal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kondisi Akhir |
| pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dab berdaya saing | | | | pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani. | % Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan. | Pertanian | dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan | Persen | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | Meningkatnya ketahanan pangan daerah. | Angka kecukupan pangan utama. | Pangan | Dinas Ketahanan pangan | Persen | 142.870,3 | 147.920,3 | 152.970,4 | 158.020,4 | 163.070,5 | 168.120,5 | 173.170,6 |
| | | | | MISI 5 : Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat | Indeks kualitas lingkungan hidup | 64,74 | 69,00 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pemukiman sehat | % Permukiman sehat. | Perumahan dan Pemukiman | Dinas PKP | Persen | 74,21 | 74,60 | 74,95 | 75,67 | 76,78 | 77,09 | 78,57 |
| | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | Lingkungan hidup | Dinas LH BPBD | Indeks | 67,28 | 67,28 | 67,82 | 68,36 | 68,91 | 69,45 | 70 |
| MISI 6 : Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja dan melindungi hak - hak masyarakat yang berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mengentaskan Penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja, sertapenegakan hukum. | Angka kemiskinan | 11,91 | 10,95 | Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha | Angka pengangguran terbuka | Ketenaga Kerjaan | Dinas Tenaga Kerja | Persen | 7,69% | 7,69 % | 7,6 % | 7,5 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,3 % |
| | | | | Menurunnya masalah kesejahteraan sosial. | % Penurunan PMKS | Sosial | Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak | Persen | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2% | 2 % | 2 % |
| | | | | Meningkatnya | Indeks Desa | Pemberday | Dinas PMD | Indeks | n/a | 0,4076 | 0,7154 | 0,7459 | 0,775 | 0,806 | 0,8461 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan | OPD | Satuan | Target | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | | Kondisi Awal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kondisi Akhir |
| | | | | pemberdayaan masyarakat desa. | Membangun | aan Masyarakat Desa | | | | | | | 9 | 1 | |
| | Pelaksanaan Norma Hukum Daerah (Perda) | 70% | 95% | Menurunnya pelanggaran Perda. | % Penaganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Ketahanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat | Satpol PP | Persen | n/a | 13% | 22% | 35% | 55% | 75% | 100% |
| MISI 7 : Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas | IPM | 67,40 | 69,40 | Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga | Rata-rata lama sekolah | Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tahun | 6,90 | 7,15 | 7,50 | 7,85 | 8,25 | 8,60 | 8,85 |
| | | | | | Angka harapan lama sekolah | Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tahun | 13,29 | 13,69 | 13,72 | 13,81 | 13,90 | 13,95 | 13,98 |
| | | | | Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Kesehatan | Dinas Kesehatan RSUD | Tahun | 72,08 | 72,14 | 72,39 | 72,64 | 72,89 | 73,14 | 73,14 |
| Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB | Indeks Pembangunan Gender | 62,82 | 63,42 | Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan Pengendalian Penduduk | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak | Indeks | 62,82 | 62,96 | 63,10 | 63,24 | 63,51 | 63,55 | 63,65 |
| | | | | | % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | % Laju | Pengendali | Dinas PPKB | Persen | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan | OPD | Satuan | Target | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|---------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | | Kondisi Awal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kondisi Akhir |
| | | | | | pertumbuhan penduduk. | an Penduduk dan KB | | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga | % Cabang olahraga yang berprestasi. | Kependudukan dan olahraga | Dinas Perda dan Olahraga | Persen | n/a | 4,5 | 9 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 |
| | | | | | % Organisasi Kepemudaan yang berprestasi | Kependudukan dan olahraga | Dinas Perda dan Olahraga | Persen | n/a | 5 | 10 | 14,3 | 18,2 | 21,7 | 25 |

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008